



## *Human Resources Capacity Based on Smart Village in Wringinsongo Village*

### **Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis *Smart Village* pada Desa Wringinsongo**

Siti Amerieska<sup>1\*</sup>, Ludfi Djajanto<sup>2</sup>, Santi Rahayu<sup>3</sup>, Aang Afandi<sup>4</sup>,  
Andi Kusuma<sup>5</sup>, Erlin Melani<sup>6</sup>, Fadelis Sukya<sup>7</sup>  
Muhammad Akhlis Rizza<sup>8</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Manajemen, <sup>4</sup>Program Studi Keuangan, Politeknik Negeri Malang  
<sup>5,6</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>7</sup>Program Studi Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang  
<sup>8</sup>Program Studi Teknik Mesin, Politeknik Negeri Malang

E-Mail: <sup>1</sup>siti.amerieska@polinema.ac.id, <sup>2</sup>ludfimlg@yahoo.com, <sup>3</sup>santi89@yahoo.com,  
<sup>4</sup>aang95@yahoo.co.id, <sup>5</sup>Indrawan.andi@gmail.com, <sup>6</sup>erlinmleani13@gmail.com,  
<sup>7</sup>fadeliss@gmail.com, <sup>8</sup>muh.akhlis@polinema.ac.id

*Corresponding Author: Siti Amerieska*

#### **Abstract**

*The problems faced by the Wringinsongo village government include: The Smart Village masterplan and branding have not been carried out optimally both in terms of planning in the form of a Smart Village master plan due to lack of institutional coordination and community participation in promoting Wringinsongo Village as a digital village. 2.) The field of village government administration: the excellent service provided by village officials is not yet maximal, especially in terms of village administration governance (managerial skills, financial reporting and other organizational administration), besides that there is no livelihood information database and smart potential village based on digital technology. The solutions and methods offered: 1) Conduct aspiration nets and identify the potential of village tourism so that the service program outputs produced by the village will have a master plan in developing Smart Villages and branding skills to promote tourism villages using the principles of the Sustainable Livelihood Framework for Smart Villages. 2.) Training to improve the human resources of village officials which will be carried out in two stages. The first stage of basic skills training is the ability to operate a simple computer in village administrative governance activities. The second is the development of knowledge transfer and village administration governance skills by applying appropriate technology in the form of the SIM- RIwinK application (WRinginsongo Population Administration Management Information System) based on the Sustainable Livelihood Framework for Smart Villages.*

*Keywords: Administration of Population, Smart Village, SIMRIwinK*

#### **Abstrak**

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Wringinsongo antara lain: 1) *Masterplan* dan *branding Smart Village* belum dilakukan secara maksimal baik dari sisi perencanaan berupa *masterplan Smart Village* karena kurangnya koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan Desa Wringinsongo sebagai desa digital. 2.) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa: belum maksimalnya pelayanan prima yang dilakukan oleh perangkat desa terutama dalam hal tata kelola administrasi desa (kemampuan manajerial, pelaporan keuangan dan administrasi organisasi lainnya), disamping itu tidak ada database informasi livelihood (mata pencaharian) dan potensi *Smart Village* berbasis teknologi digital. Solusi dan metode yang ditawarkan: 1) Mengadakan jaring aspirasi serta identifikasi potensi wisata desa sehingga luaran program pengabdian yang dihasilkan desa akan memiliki *masterplan* dalam pengembangan *Smart Village* dan ketrampilan branding untuk mempromosikan desa wisata dengan menggunakan prinsip *Sustainable Livelihood Framework for Smart Village*. 2.) Pelatihan peningkatan SDM perangkat desa yang

akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pelatihan basic skill kemampuan untuk mengoperasikan computer secara sederhana dalam kegiatan tata kelola administrasi desa. Kedua berupa pengembangan transfer pengetahuan dan ketrampilan tata kelola administrasi desa dengan menerapkan teknologi tepat guna berupa aplikasi SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan WRinginsongo) berbasis *Sustainable Livelihood Framework for Smart Village*

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, SIMRIwinK, *Smart Village*

## 1. PENDAHULUAN

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan lebih besar bagi masyarakat desa untuk membangun wilayahnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk kegiatan kepariwisataan. Wilayah Desa Wringinsongo terdiri dari dua dusun yaitu dusun Nongkosongo dan dusun Sumberingin jumlah penduduk 2660 jiwa. Desa ini terdiri dari 875 KK dengan rincian 35 RT dan 9 RW. Untuk menunjang kesehatan masyarakat, desa Wringinsongo memiliki potensi sumber daya air yang luar biasa berlimpah. Mayoritas masyarakat beragama Islam, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Wringinsongo di bidang pertanian, yakni sebanyak 702 orang, selanjutnya juga bidang jasa sebanyak 342 orang. Sedangkan bermata pencaharian pedagang sebanyak 126 orang sisanya 176 orang pada bidang lain. Selain itu, dalam kesehariannya masyarakat berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa.

Sejarah Desa Wringinsongo tidak terlepas dari keberadaan pemandian Sumberingin Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi wisata desa Wringinsongo yang masih belum banyak mengalami perubahan. Besarnya potensi wisata belum digarap maksimal sehingga kurang bisa bersaing dengan wisata alam dan buatan lainnya di wilayah kecamatan Tumpang, padahal banyak kelebihan yang dimiliki untuk bisa menarik pengunjung, hal ini diungkapkan oleh Bapak Heri selaku Kepala Desa Wringinsongo pada saat tim melakukan survey pendahuluan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Survey Pendahuluan Tim PkM

Konsep *Smart Village* menginspirasi Desa Wringinsongo untuk mengidentifikasi kembali potensi yang ada di wilayahnya agar dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang lebih beragam. Selain pengembangan desa wisata juga tidak mungkin lepas dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM)[1], untuk program kemitraan tahun 2021 ini tim Polinema mendapat masukan dari pemerintah desa untuk dapat memberikan pengembangan SDM kepada perangkat desa agar kedepan semua perangkat desa mampu bertanggungjawab dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara tertib dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya, yang nantinya juga sebagai fasilitator pengembang *Smart Village*[2]. Adapun masalah yang dapat dirumuskan setelah melakukan survey pendahuluan mencakup permasalahan bidang teknologi informasi serta penyelenggaraan pemerintah desa.

### 1. Bidang teknologi informasi

- a. Pemerintah desa Wringinsongo masih menggunakan cara manual dengan aplikasi Ms.Word untuk pelayanan administrasi kependudukan desa
- b. Belum ada teknologi informasi yang terintegrasi, bahkan kecenderungan tidak memiliki data base informasi yang akurat dan *up to date*
- c. Pemerintah desa Wringinsongo belum mempunyai perencanaan strategis teknologi informasi dan

sistem informasi dalam menunjang strategi implementasi *Smart Village* sehingga diarahkan kepada pengembangan sistem sesuai dengan tuntutan pada masa saat ini dan masa mendatang.

2. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
  - a. Belum maksimalnya pelayanan prima yang dilakukan oleh perangkat desa Wringinsongo terutama dalam hal teknologi informasi hal ini dikarenakan masih terdapat administrasi desa Wringinsongo yang bersifat manual, belum di *backup* dengan teknologi informasi. Beberapa pencatatan kegiatan masih mengandalkan administrasi menggunakan buku atau tulisan di papan sehingga belum terdokumentasikan dengan baik. Selain itu website desa juga belum dimanfaatkan secara maksimal.
  - b. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia global saat ini ditambah juga dengan adanya pandemic COVID 19 yang berlangsung sekian lama, menuntut semua sistem kinerja mampu beradaptasi sebaikbaiknya. Namun kendala terbesar adalah kemampuan SDM terkait dengan teknologi digital, kemampuan manajerial, pelaporan keuangan dan administrasi, tidak semua perangkat desa menguasai penggunaan dasar operasional computer apalagi memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan tata kelola administrasi desa. Sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa yang kurang berjalan secara berkelanjutan, artinya beberapa kegiatan peningkatan SDM diadakan namun tidak dilakukan secara tuntas dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan permasalahan pemahaman dan ketrampilan administrasi tata kelola desa yang belum maksimal.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dimulai dari pembentukan tim, perumusan tujuan, identifikasi pemangku kepentingan, analisis permintaan, mediasi, simulasi, substitusi, advokasi, evaluasi, hingga tahap akhir berupa penentuan kebutuhan baru.

1. *Team building*  
Pembentukan tim dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memudahkan koordinasi sesuai bidang keahlian anggota tim yang ada. Tim Pengabdian Masyarakat (PKM) ini terdiri dari lima personel yang memiliki keahlian di bidang akuntansi, manajemen tourism, teknologi informasi, strategi manajemen dan *marketing*.
2. Perumusan tujuan  
Penyusunan tujuan PKM ini dilakukan untuk memahami peta implementasi yang akan dilakukan sesuai target dan pencapaian solusi yang akan diberikan kepada mitra.
3. Identifikasi pemangku kepentingan  
Identifikasi stakeholders disini merupakan pemetaan pihak-pihak yang terkait dengan mitra dan tim PKM Kemitraan. Setelah teridentifikasi ditemukan adanya beberapa pihak yang mendukung kegiatan ini yaitu Pemerintah Desa Wringinsongo yang diyakini berperan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wringinsongo serta mendukung kegiatan PKM yang dilakukan oleh tim.
4. Analisis & tinjauan permintaan  
Analisis data sosial ekonomi mitra PKM hasil survei pendahuluan sebagai dasar perumusan pelaksanaan kegiatan PKM. Adapun analisis kebutuhan lebih didasarkan pada metode apa yang cocok untuk dilakukan ketika akan memberikan solusi atas masalah tersebut.
5. Mediasi  
Digunakan untuk acara di mana wali kegiatan menempatkan dirinya sebagai mediator bagi pihak-pihak terkait dan menangani masalah masyarakat secara kolektif.
6. Simulasi sains & teknologi  
Simulasi IPTEK digunakan untuk kegiatan menginformasikan produk yang dihasilkan berupa aplikasi administrasi desa digital SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Desa Wringinsongo)
7. Substitusi Iptek  
Kegiatan ini menawarkan iptek baru yang lebih modern dan efisien dari iptek sebelumnya. Yaitu berupa aplikasi SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Desa Wringinsongo).

#### 8. *Advocacy*

Bantuan dalam penggunaan aplikasi SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Desa Wringinsongo) dan pembuatan *marketplace* dan *branding* desa wisata berbasis *Sustainable Livelihood Framework for Tourism*. *Advocacy* ditujukan kepada mitra untuk meningkatkan tata kelola administrasi desa, motivasi pelayanan prima, serta perencanaan *masterplace* dan *branding* desa wisata. Pelatihan dimaksudkan agar mitra memiliki keahlian (*skill*) dari aspek kegiatan usaha yang solusinya belum terselesaikan dalam pendekatan konsultasi. Dalam pendekatan ini dilakukan setelah menentukan masalah yang memerlukan pelatihan tindak lanjut dari hasil konsultasi pada semua aspek kegiatan usaha, metode tersebut dinamakan *problem solving* agar mitra dapat meningkatkan produksi masker yang mandiri dan efisien.

#### 9. Review & Evaluasi

Rancangan metode implementasi dan evaluasi yang akan dilakukan (evaluasi proses, final dan tindak lanjut).

#### 10. Tentukan kebutuhan & prioritas baru

Setelah melakukan tahap evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, baik metode pelayanan yang dilakukan maupun permasalahan di luar target semula. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi tim pelaksana layanan untuk dapat menemukan target baru sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan layanan selanjutnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Sebagai Perwujudan *Smart Village*

Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh pada kinerja pelayanan publik[3] khususnya di Desa Wringinsongo. Untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini tim PKM Polinema melakukan analisis perencanaan strategis sistem informasi pelayanan desa atau biasa disebut juga *Smart Village strategic planning*. Untuk mewujudkan *Smart Village* ini tahapan proses awal adalah melakukan perencanaan strategis di bidang teknologi informasi dan sistem informasi pada proses bisnis layanan administrasi kependudukan desa[4]. Dari perencanaan strategis, maka pemerintah desa dapat melihat kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI[5], sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat desa Wringinsongo. Adapun masalah yang dapat dirumuskan setelah melakukan survey pendahuluan mencakup bidang teknologi informasi.

##### 1) Tahapan Perencanaan Strategis

###### a. Analisa kondisi saat ini

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal bisnis serta kondisi internal dan eksternal SI/TI perusahaan. Metode yang dilakukan adalah Analisa Kondisi Internal Bisnis, Analisa yang memetakan tujuan organisasi strategis, sasaran organisasi strategis hingga capaian yang diraih sampai saat ini. Untuk mengetahui realisasi strategis dari pemerintah desa Wringinsongo.

###### b. Analisa Kondisi Eksternal Bisnis

Analisa yang dilakukan dengan menggunakan analisa SLA (*Sustainable Livelihood Asset*), yang merupakan analisa eksternal yaitu sebuah lingkungan eksternal organisasi perusahaan yang menyusun faktor- faktor dalam lingkup luas dan diluar dari organisasi perusahaan berupa kondisi ekonomi, teknologi, dan kondisi bisnis yang dimiliki.

###### c. Analisa Kondisi Internal SI/TI

Analisa yang mencakup kondisi SI/TI perusahaan, bagaimana melakukan review terhadap infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dan juga melakukan pengamatan peran sumber daya dan sistem informasi di dalam proses bisnis sehari-hari.

###### d. Analisa Kondisi Eksternal SI/TI

Analisa yang dilakukan untuk mengetahui kondisi tren SI/TI yang digunakan oleh kompetitor yang sejenis.

###### e. Analisa SWOT

Hasil dari analisa SWOT yang disajikan pada Tabel 1

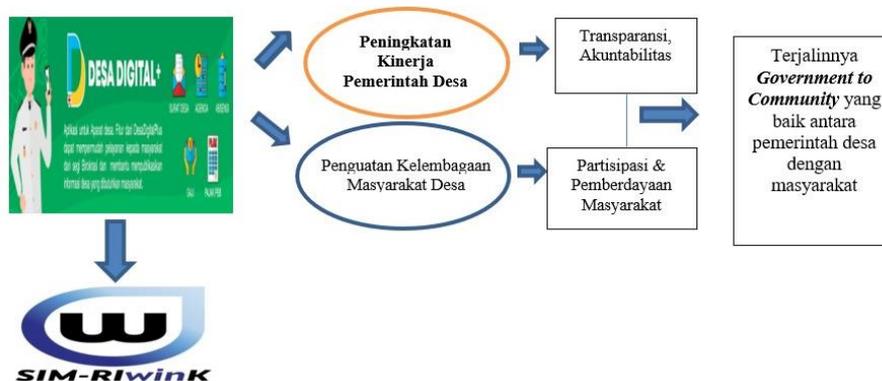
**Tabel 1.** Analisis SWOT Desa Wringinsongo

Kode	Keunggulan (Strengths)
ST1	Lokasi desa Wringinsongo strategis kaya akan sumber daya alam
ST2	Kebijakan pelayanan masyarakat terstandarisasi
ST3	Adanya kerjasama dengan pihak ke tiga seperti universitas, entitas
ST4	Adanya sarana & prasarana sebagai pijakan awal pengembangan <i>Smart Village</i>
ST5	Potensi produksi lokal bernilai tinggi & suasana desa yang masih alami dan asli
Kode	Kelemahan (Weakness)
WN1	Belum dilakukannya promosi desa
WN2	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerja sama mempromosikan desa
WN3	Terbatasnya sarana & prasarana tertentu seperti akses internet
Kode	Peluang (Opportunity)
	Menetapkan keunikan & kekhasan desa sebagai <i>Smart Village</i> & desa wisata
OP1	Melaksanakan perencanaan & pengembangan pariwisata desa berbasis alam &
OP2	<i>Smart Village</i>
OP3	Melakukan kerjasama melalui koordinasi antar masyarakat dengan pihak
OP4	stakeholder terkait
	Memanfaatkan program desa mitra dalam rangka pengembangan potensi, produk lokal & pemberdayaan masyarakat
Kode	Ancaman (Threat)
TH1	Tuntutan reformasi birokrasi pemerintah berbasis total quality management
TH2	Perubahan & perkembangan era digital
TH3	Munculnya peraturan pemerintah tentang Sustainable Development Goals SDGS
TH4	Desa
	Setiap pemerintah desa wajib bertanggungjawab terhadap pengelolaan aset

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan pada desa Wringinsongo dapat diketahui apa saja menjadi prioritas ke depan pembangunan. Di satu sisi juga mempertimbangkan aspek tantangan dan hambatan, dengan demikian akan lebih baik mengetahui bagaimana cara mengatasinya.

## 2) Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis *SMART VILLAGE*

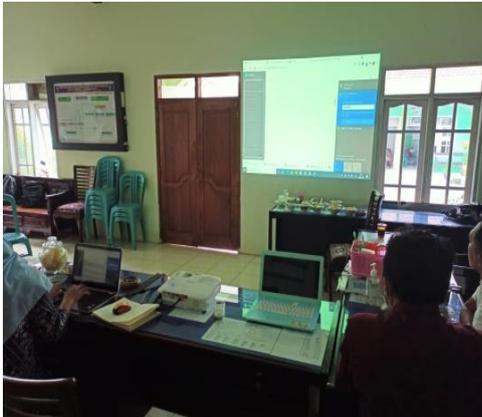
Struktur desa menempatkan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perkembangan dan kemajuan desa, sehingga hampir seluruh kebijakan yang menyangkut desa akan senantiasa memperhatikan keberadaan masyarakat[6]. Dalam konteks penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat menjadi dasar dan tujuan dari penyelenggaraan peran dan fungsi pemerintahan desa tersebut. Hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi suatu keharusan. Hubungan tersebut harus terjalin dalam berbagai aspek yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Teknologi informasi dijadikan sebagai media untuk menghubungkan keduanya[7]. Di satu sisi, teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai media untuk menyampaikan berbagai layanan kepada masyarakat baik itu layanan pemerintahan desa maupun pembangunan desa. Teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai alat yang mampu mempermudah pembinaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, teknologi informasi dijadikan sebagai alat oleh masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa, baik itu layanan penyelenggaraan pemerintahan maupun layanan pembangunan desa[8]. Konsep *Smart Village* Desa Wringinsongo dapat dilihat pada gambar 3.

**Gambar 3.** *Smart Village* Desa Wringinsongo

SIMRIwinK adalah sebuah aplikasi administrasi digital kependudukan yang berupa persyuratan untuk keperluan masyarakat desa Wringinsongo. Pemberian nama SIMRIwinK pertama, didasarkan atas lokal wisdom yang ada di Desa Wringinsongo berupa potensi alam dan kehidupan sosial masyarakat. Kedua kemudahan dan penguatan nama desa, harapannya masyarakat lebih familiar dengan menggunakan istilah atau sebutan SIMRIwinK. Hasil evaluasi pelaksanaan PKM, pertama dalam proses pelaksanaan PKM ini mengalami perubahan fokus bidang, dimana semula kegiatan PKM ini mengintegrasikan bidang desa wisata (Tourism) menjadi berfokus pada pembangunan Desa Digital. Dasar yang dilakukan perubahan ini karena adanya analisis prioritas kebutuhan dari stakeholder, kedua dikarenakan adanya kesamaan cakupan antara tim PKM yang lain, untuk itu menghindari overlapping maka pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagaimana yang dilaporkan saat ini.

Kendala utama pada saat pelaksanaan yang dihadapi oleh tim adalah keterbatasan waktu dan kegiatan karena adanya PPKM Covid 19, sehingga interaksi berupa observasi dan simulasi lapangan belum dapat dilakukan secara maksimal. Kendala selanjutnya adalah proses penyempurnaan aplikasi yang terkendala dengan beragam jenis surat kependudukan, semisal terdapat beberapa surat yang memiliki list dengan karakteristik yang kompleks, hal ini menjadi tantangan bagi programmer tim untuk membuatnya. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan & Sosialisasi SIMRIwinK dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.** Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan & Sosialisasi SIMRIwinK

No.	Dokumentasi	Keterangan
1.		Langkah awal yaitu melakukan identifikasi pemangku kepentingan, berupa pemetaan pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan Aplikasi SIMRIwinK yang dilakukan oleh perangkat Desa Wringinsongo.  Peran Mitra: Melakukan analisis data kependudukan dan list pelayanan administrasi kependudukan bersama Tim PkM Menyediakan data list kependudukan dan form surat administrasi kependudukan
2.		Langkah kedua simulasi sains & teknologi. Simulasi IPTEK digunakan untuk kegiatan menginformasikan produk yang dihasilkan berupa aplikasi administrasi desa digital SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Desa Wringinsongo).  Peran Mitra: Menyediakan fasilitas tempat dan peralatan (LCD, layar, jaringan internet) untuk mempermudah proses simulasi Para perangkat desa mensinkronkan data antara aplikasi dengan data base yang tersedia.
3.		Langkah ketiga Substitusi Iptek Kegiatan ini menawarkan iptek baru yang lebih modern dan efisien dari iptek sebelumnya. Yaitu berupa aplikasi SIM-RIwinK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Desa Wringinsongo).  Peran Mitra: Memberikan masukan dan saran perbaikan aplikasi SIM-RIwinK. Melengkapi data surat yang akan diaplikasikan pada SIM-RIwinK

4.



Langkah keempat Sosialisasi Aplikasi SIMRIwinK. Kegiatan ini merupakan kombinasi pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi SIMRIwinK pada perangkat desa Wringinsongo.

Peran Mitra:

Berpartisipasi secara aktif menggunakan melalui android (smart phone) mencoba aplikasi SIMRIwinK

Memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki aplikasi

### 3) KESIMPULAN

Pengembangan *Smart Village* dalam konteks desa-desa di Indonesia meskipun banyak dipengaruhi oleh pengembangan smart city[9], tetapi harus dikonstruksikan secara berbeda. *Smart Village* harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didasarkan kepada realitas bahwa pengembangan *Smart Village* dihadapkan kepada lokalitas nilai, tradisi, dan budaya yang ada di desa. Lokalitas tersebut harus diakomodasi, dipertahankan, dan dikembangkan dengan didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi yang sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan desa.

Konstruksi *Smart Village* didasarkan kepada 3 (tiga) elemen pokok yang terdiri dari smart government, smart community dan smart environment. Ketiga elemen itu dijadikan sebagai dasar dan cara “tools” untuk mencapai tujuan “goals” pengembangan *Smart Village*, yaitu berupa keterjalinan konstruktif “smart relationship”. Dari relasi yang muncul di antara ketiga elemen *Smart Village*, output yang dihasilkan berupa sinergitas antarelemen *Smart Village* yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan outcome berupa produktivitas elemen *Smart Village* yang mampu mendorong perbaikan ketiga elemen tersebut

Pelaksanaan PKM *Smart Village* di desa Wringinsongo ini memberikan pandangan ke depan bagi Tim PKM untuk memberikan pendampingan implementasi aplikasi SIM-RI winK dengan menggunakan implementasi teknologi, harapannya perangkat desa Wringinsongo dapat memanfaatkan aplikasi sehingga pelayanan prima dapat dengan mudah dilakukan bahkan ditingkatkan.

Pelaksanaan kegiatan PkM yang berupa pelatihan, dalam pendekatan ini dilakukan setelah penentuan masalah yang membutuhkan tindak lanjut. Dari hasil pelatihan hingga konsultasi terhadap semua aspek aktifitas pelayan administrasi kependudukan ini akhirnya mitra dapat meningkatkan pelayannya prima secara efisien dan efektif dengan penghematan waktu serta keterandalan data base kependudukan. Pelaksanaan kegiatan PkM selama 8 (delapan) bulan ini memberikan pengaruh yang luar biasa khususnya bagi perangkat desa Wringinsongo yang semakin termotivasi dalam menggunakan aplikasi SIM-RIwinK

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada P2M Politeknik Negeri Malang selaku pemberi dana kegiatan PKM Kemitraan dan kedua kepada Desa Wringinsongo selaku desa mitra yang berperan sebagai objek kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### REFERENSI

- [1] A. A. Rahma, “Jurnal Nasional Pariwisata,” J. Nas. Pariwisata, vol. 12, no. April, pp. 1–8, 2020.
- [2] Nurjayadi, “Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Melalui Kegiatan *Smart Village* pada Desa Rimba Makmur Kabupaten Kampar,” Din. J. Pengabd. Kpd. Masy., vol. 4, no. 1, pp. 140–151, 2020, doi: 10.31849/dinamisia.v4i1.3224.
- [3] E. Z. L. Astuti, “Gerakan Literasi Digital: Studi Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Sistem Informasi Potensi Kreatif Desa di Kulonprogo,” J. Pemberdaya. Masy. Media Pemikir. dan Dakwah Pembang., vol. 3, no. 2, 2019, doi: 10.14421/jpm.2019.032-05.
- [4] N. Saidah, L. Khasanah, Asriyatuzzahra, and S. Ridloah, “Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program *Smart Village*,” J. Reg. Rural Dev. Plan., vol. 6, no. 2, pp. 123–135, 2022, doi: 10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135.
- [5] M. Susilowati and D. Chandra, “Sistem Informasi Administrasi Desa Di Kantor Desa Sumbersekar,” Kurawal - J. Teknol. Inf. dan Ind., vol. 1, no. 1, pp. 40–44, 2018, doi: 10.33479/kurawal.2018.1.1.40-44.

- [6] M. G. S. Wicaksono, M. R. Laily, R. Firmansyah, and F. Purnamasari, "Madep Manteb Manetep Value-Based Village Budgeting in Malang Regency," Proc. 7th Reg. Account. Conf. (KRA 2020), vol. 173, no. Kra 2020, pp. 270–276, 2021, doi: 10.2991/aebmr.k.210416.035.
- [7] A. Beriansyah and R. Y. Maulana, "Pelatihan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep *Smart Village* Government Di Kecamatan Jambi Luar Kota," RAMBIDEUN J. Pengabd. ..., vol. 3, no. 2, pp. 21–25, 2020, [Online]. Available: <http://103.215.72.91/index.php/pkm/article/view/216>
- [8] A. Meijer, "Datapolis: A Public Governance Perspective on 'Smart Cities,'" Perspect. Public Manag. Gov., vol. 1, no. 3, pp. 195–206, 2018, doi: 10.1093/ppmgov/gvx017.
- [9] D. Herdiana, "Pengembangan Konsep *Smart Village* Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the *Smart Village* Concept for Indonesian Villages)," J. IPTEKKOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf., vol. 21, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16.